

LEMBAR KERJA

PROBLEM ANALISIS

No Peserta : 6
Nama : Reza Febriyanto
Tanggal : 8 November 2021

Tanggapan :

Reformasi Birokrasi di Indonesia memang telah cukup lama dicanangkan oleh pemerintah. Akan tetapi, fakta menunjukkan program reformasi birokrasi tidak optimal terimplementasi dengan baik. Parameter sederhana untuk mengukur ketidakefektifannya adalah melalui kinerja para aparatur pemerintah saat ini. Selain itu, kebijakan yang kurang tepat seperti mengangkat pegawai non ASN untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dirasa hanya membuang anggaran tanpa hasil yang optimal. Bahkan beberapa memanfaatkan hal tersebut dengan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada tenaga non ASN. Hasil akhirnya, ASN yang seharusnya lebih paham dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan, malah tersisih dari segi penguasaan teknis pekerjaan. Beberapa faktor yang mendorong hal tersebut antara lain :

1. Sistem kinerja yang kurang efektif dan akuntabel;
2. Lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
3. Lemahnya penerapan reward dan punishment di lingkungan kerja;
4. Kurang optimalnya evaluasi yang dilakukan;
5. Minimnya minat dalam mengikuti pengembangan kompetensi, baik melalui formal maupun informal;
6. Rendahnya komitmen antar pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya untuk membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK dimana didalamnya terdapat pasal larangan yang menyatakan bahwa PPK (dalam hal ini kepala daerah) dilarang mengangkat tenaga kontrak/honorir pada jabatan ASN. Akan tetapi faktanya, minimnya sosialisasi dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan membuat hal tersebut sulit diimplementasikan pada K/L/D masing-masing.

Reformasi birokrasi juga harus melihat karakteristik daerah masing-masing. Bagaimana kesiapan SDM aparatur dan juga anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tidak seluruhnya dapat diimplementasikan secara langsung dan bersama-sama. Akan tetapi harus bertahap sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Kalimantan timur sebagai calon ibu kota negara baru, dinilai telah memiliki kesiapan dalam hal sarana dan prasarana yang cukup memadai. Daya saing SDM aparatur dan anggaran yang dimiliki juga tidak kalah dengan daerah lainnya, termasuk di Jawa dan sekitarnya. Sehingga penerapan reformasi birokrasi, sangatlah memungkinkan untuk diterapkan di Kalimantan timur. Adapun langkah yang dapat dilalui untuk menerapkan hal tersebut antara lain :

1. Membuat sistem kinerja yang baik. Hal ini dapat mengadopsi pada daerah yang telah berhasil menerapkan sistem kinerja secara efektif dan akuntabel. Atau dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk berinovasi dalam membuat parameter kinerja yang handal.
 2. Melaksanakan pemetaan pegawai dengan melakukan pengukuran kompetensi pegawai. Sehingga dapat terlihat GAP kompetensi para aparatur.
 3. Melaksanakan pengembangan kompetensi senang diberi petunjuk mengenai apa yang harus secara konsisten sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan dasar hasil pengukuran kompetensi, kemudian dilakukan sinergi dengan instansi penyelenggara pengembangan kompetensi. senang diberi petunjuk mengenai apa yang harus
 4. Melakukan perbaikan pada sistem reward dan punishment. Hal tersebut dapat memacu kinerja pegawai secara menyeluruh jika seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dan konsisten dalam penerapan sistem tersebut.
 5. Libatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sebagai langkah transparansi pemerintah ke masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban.
- Terkait pegawai non ASN, perlu komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai hal ini menjadi wadah yang bagus dan terkesan bermuatan politik pada implementasinya.